



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 telah selesai disusun sebagaimana mendasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu RKPD Tahun 2022 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023, maka disusunlah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang berisikan program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Medan, 2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Ir. H. IRMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610905 199003 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman :
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMINFO PROVSU TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Provsu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.3. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	33
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	35
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	43
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	44
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kominfo Provsu	45
3.3. Program dan Kegiatan.....	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	51
BAB V PENUTUP	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (comon goals) dan Pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) yang merupakan pedoman perencanaan Pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang Tahun Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 1 (satu) tahun.

Penyusunan Renja dimaksudkan bertujuan untuk melihat sejauhmana program dan kegiatan yang telah dilaksanakan berhasil atau tidak melalui evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025 dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 serta Rancangan Akhir Renstra OPD Dinas Kominfo Tahun 2019-2023.

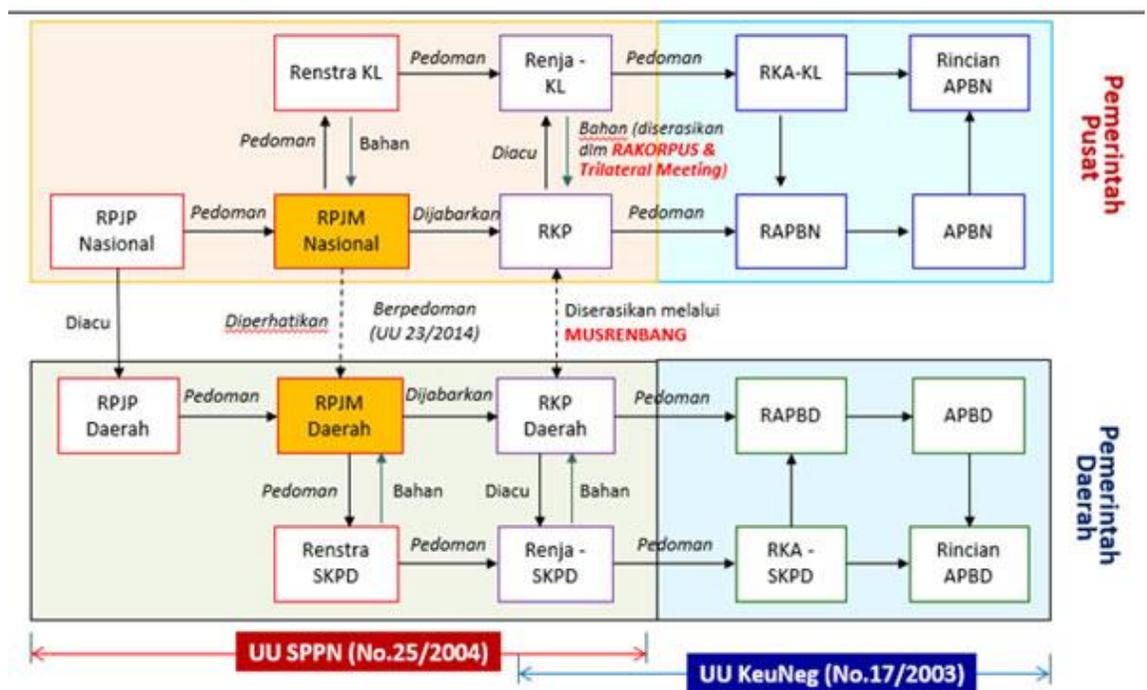
Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas pada forum Perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang.

Pada Tahun 2021 Anggaran Biro Humas sudah beralih ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan amanat

Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengalihan Tugas kehumasan dari Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Keterkaitan antara Renja perangkat daerah dengan dokumen RKPD bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, yang memuat sasaran dan strategi pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun masa pemerintahan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang dapat menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan merupakan Penjabaran dari RPJM Daerah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, dengan demikian, Rrenja Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada RKPD Provinsi.

Gambar. Bagan alur Keterkaitan dokumen Perencanaan



Keterkaitan antar dokumen perencanaan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut: Perencanaan Anggaran Jangka Panjang Jangka Menengah Jangka Pendek PUSAT DAERAH RPJP Nasional RPJM Nasional Renstra KL RPJP Daerah Renstra RKPD Renja KL RKP RAPBN Nasional RPJM Daerah RKPD RAPBD Renja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan merupakan Penjabaran dari RPJM Daerah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kritikan dalam penyusunan RKPD dalam hal ini adalah keterlibatan masyarakat. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah yang berjangka panjang dan menengah saja diatur supaya melibatkan masyarakat secara aktif. Penyusunan RKPD yang berjangka waktu tahunan dan produk perencanaan yang paling up to date serta langsung dapat dirasakan masyarakat, penyusunannya justru tidak diatur harus melibatkan masyarakat. Demikian pula dengan kekuatan hukum bagi RKPD itu yang dapat ditetapkan hanya dengan Peraturan Kepala Daerah, padahal dokumen RKPD itu menjadi acuan bagi penyusunan RAPBD dan RAPBD memiliki kekuatan hukum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Untuk penganggaran program atau kegiatan di daerah dalam undang – undang ini tercermin dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan RAPBD dalam peraturan perundangan ini mengacu pada Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD)

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
15. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2022.
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 tahun 2016 tentang susunan organisasi dinas-dinas daerah Provinsi Sumatera Utara.
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Sumatera Utara
20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengembangan e- Government Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.
21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengalihan Tugas kehumasan dari Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
22. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan penyusunan Rencana Kerja adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan.

Adapun tujuan penyusunannya adalah sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan dalam melaksanakan sesuai tupoksi, untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya tujuan dan sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang Rencana Kerja beserta Pendanaan Program dan Kegiatan Diskominfo Provinsi Sumatera Utara.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kominfo Provsu tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Rencana Kerja yang lebih baik, efektif dan akuntabel, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menjadi referensi dalam melakukan langkah-langkah perbaikan. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Kominfo Provsu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2020 yang meliputi :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program / kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Lebih lanjut, jika dilihat dari aspek serapan (realisasi) keuangan Dinas Kominfo Provsu tahun 2020 berdasarkan program, maka dapat diperoleh data sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin), pagu anggaran sebesar Rp. 1.727.388.254,04,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.643.682.656,- Capaian kinerjanya sebesar 95,15 %.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Rutin) pagu anggaran sebesar Rp.2.199.269.159,- dengan realisasi sebesar Rp.2.136.515.701,- Capaian kinerjanya sebesar 97,15 %.

- 3) Program Peningkatan Displin Aparatur (Program Rutin) pagu anggaran sebesar Rp.7.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.800.000,-. Capaian kinerjanya sebesar 100 %.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Program Rutin) pagu anggaran sebesar Rp.18.180.000,- dengan realisasi sebesar Rp.17.500.000,- Capaian kinerjanya sebesar 96,26 %.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja Keuangan (Program Rutin) pagu anggaran sebesar Rp.161.116.642,- dengan realisasi sebesar Rp157.828.950,-. Capaian kinerjanya sebesar 97,96 %.
- 6) Program Penyelenggaraan Statistik sektoral (Program Operasional) pagu anggaran sebesar Rp.185.540.000,- dengan realisasi sebesar Rp.183.315.000,-. Capaian kinerjanya sebesar 98,80 %.
- 7) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (Program Operasional) pagu anggaran sebesar Rp.4.962.872.013,- dengan realisasi sebesar Rp.4.746.804.278,- Capaian kinerjanya sebesar 95,65 %.
- 8) Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Program Operasional) pagu anggaran sebesar Rp.152.344.000,- dengan realisasi sebesar Rp.136.648.280,- Capaian kinerjanya sebesar 89,70 %.
- 9) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Program Operasional) pagu anggaran sebesar Rp.3.144.119.843,- dengan realisasi sebesar Rp.3.081.745.504,- Capaian kinerjanya sebesar 98,02 %

I. Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Adanya refofusing anggaran pada APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 yang dialokasikan untuk dana covid-19, hal ini berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara , termasuk juga tingkat capaian kinerjanya. Untuk capaian kinerja yang sudah ditetapkan disesuaikan dengan capaian kinerja berdasarkan anggaran refofusing, sehingga kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan perubahan target dana refofusing.

I. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Pada bahasan di atas telah dijelaskan bahwa adanya efisiensi anggaran APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 berimplikasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan di Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara. Kendatipun demikian, efisiensi anggaran tidak sepenuhnya berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan, sehingga capaian kinerja yang diharapkan telah memenuhi target yang ditetapkan. Adapun program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :

A. Program Rutin

a. Program Layanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan
- 8) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 9) Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 10) Penyediaan Jasa pengamanan

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 2) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

c. Program Peningkatan Disiplin

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 2) Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 2) Outbound Pegawai Dinas Kominfo Provsu

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- 2) Penyusunan RKA dan DPA SKPD
- 3) Kegiatan Verifikasi dan Pembuatan Laporan Fisik Keuangan
- 4) Kegiatan Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran Neraca Akhir Tahun
- 5) Penginputan Data Keuangan dan Aset Dinas Kominfo Provsu
- 6) Penyusunan Laporan Kinerja (LK), Monitoring dan Laporan Evaluasi Dinas Kominfo Provsu
- 7) Penyusunan LKPJ dan LPPD Dinas Kominfo Provsu
- 8) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo

B. Program Operasional

a) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

- 1) Penyusunan data statistik sektoral pembangunan Sumatera Utara

b) Program pengelolaan Aplikasi Informatika

- 1) Pemakaian internet access dan lokal link dari provider ke Pemprovsu
- 2) Operasional dan layanan Infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery center dan TIK
- 3) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia TIK Sumatera Utara
- 4) Operasional dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 5) Operasional Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Aplikasi e-Government
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi melalui Website sumutprov.go.id
- 7) Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi melalui Website Diskominfo Provsu
- 8) Operasional Pengelolaan dan Peningkatan Layanan Smart Province
- 9) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengembangan Ekosistem e-Government
- 10) Penyusunan Regulasi tata kelola e- Government

c) Program Penyelenggaraan pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

- 1) Operasional dan Tunjangan Khusus Pengamanan Persandian dan Keamanan Informasi
- 2) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Persandian dan keamanan Informasi

d) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- 1) Dialog Interaktif Melalui Radio Siaran
- 2) Dialog Interaktif Melalui Radio Siaran
- 3) Berita Sumatera Utara melalui Televisi Siaran
- 4) Iklan Layanan Masyarakat Melalui Televisi Siaran dan Radio Siaran
- 5) Diseminasi Informasi Media Luar Ruang (Media Outdoor/Indoor)
- 6) Operasional peliputan Informasi Publik
- 7) Pemberdayaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat
- 8) Pembekalan Tata Kepemimpinan jurnalis dalam rangka mendukung Good Government
- 9) Temu Konsultasi Bakohumas
- 10) Operasional pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Provsu
- 11) Operasional Komisi Informasi provinsi Sumatera Utara

II. Program / kegiatan Dinas Kominfo Provsu yang tidak terlaksana

Untuk program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah kegiatan yang direcoffusing untuk dana covid-19.

III. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

Pada tahun 2020 program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan tidak ada.

IV. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD

Adanya Recofussing dalam penggunaan anggaran, berimplikasi terhadap tidak tercapainya target kinerja sasaran dan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kominfo Provsu tahun 2019-2023.

Tabel T.C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021
Provinsi Sumatera Utara

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
				Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)	
BELANJA LANGSUNG										
I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi yang tertangani									
1	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Surat-surat dinas,dokumen dinas dan surat berharga lainnya	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
2	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Rekening listrik. Air dan telepon	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%

3	<i>Penyediaan Jasa Adm Perkantoran</i>	Jasa Supervisi penyusunan Administrasi aset Diskominfo	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
4	<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>	Kebersihan gedung dan lingkungan kantor Diskominfo Provsu	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
5	<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	Tersedianya alat tulis kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
6	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
7	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
8	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan</i>	Penyediaan surat kabar, Perpu dan buku perpustakaan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
9	<i>Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	Tersedianya makan, minum pegawai, peserta rapat dan tamu Diskominfo	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
10	<i>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah</i>	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
11	<i>Rapat Koordinasi daerah Kominfo</i>	Terjalannya Koordinasi dengan mitra kerja kominfo dan stake holder	4 kali	1 kali	1 kali	0	0%		1	25%
12	<i>Penyediaan Jasa Pengamanan</i>	Tersedianya jasa pengamanan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%

II.	PROG. PENINGK. SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rasio luas kantor/jumlah aparatur								
1	<i>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
2	<i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor</i>	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
3	<i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</i>	Perawatan kendaraan operasional roda 4	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
4	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</i>	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
III.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase tingkat kehadiran pegawai								
1	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</i>	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	650 stel	150 stel	130 stel	130 stel	100%	0 0	280	43%
2	<i>Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur</i>	Terbinanya mental dan fisik aparatur Diskominfo	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu								

1	<i>Pendidikan dan Pelatihan Formal</i>	Peningkatan kualitas, kompetensi pegawai melalui diklat formal, kursus singkat, bintek, dan lain-lain	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
2	<i>Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</i>	Meningkatnya kemampuan pengelolaan Administrasi pegawai Diskominfo	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
3	OutBound Pegawai Dinas Kominfo	Terlaksananya OutBound Pegawai Dinas Kominfo	5 kali		1 kali	1 kali		1 kali	2	40%
V.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA dan KEUANGAN	Tingkat Ketepatan Menyerahkan laporan kinerja dan keuangan								
1	<i>Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran</i>	Tersedianya laporan persemester SKPD Dinas Kominfo	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3	60%
2	<i>Penyusunan RKA dan DPA SKPD</i>	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD Diskominfo	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6	60%
3	<i>Kegiatan Verifikasi dan Pembuatan Laporan Fisik Keuangan</i>	Tersusunnya laporan fisik keuangan Diskominfo	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3	60%
4	<i>Kegiatan Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran Neraca Akhir Tahun</i>	Tersusunnya laporan realisasi anggaran dan neraca akhir tahun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3	60%
5	<i>Penginputan Data Keuangan dan Aset</i>	Tersedianya data aset Diskominfo	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3	60%

6	Penyusunan Program, Lakip, Monitoring dan Evaluasi	Adanya Lakip dan Laporan Evaluasi Dinas Kominfo Provsu	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3	60%
7	Penyusunan LKPJ dan LPPD Kominfo Provsu	Jumlah dokumen Laporan LKPJ dan LPPD Diskominfo yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3	60%
8	Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Dinas Kominfo Provsu	Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kominfo	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	1	100%
9	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo	Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo	1 dokumen	0	0	0	0%	1 dokumen	1	0%
10	Forum Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat daerah lintas OPD	5 kali	-	1 kali	1 kali	100%	0	0	0%
VI.	Program Pengembangan Komuikasi, Informasi dan Media Massa	Terwujudnya kepastian legal yg menjamin hak-hak masyarakat mendapatkan informasi yang diperlukan (right to know) dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat (obligation to tell)								

1	Pementasan Media Tradisional pertunjukan rakyat di kabupaten/kota	Frekuensi Publikasi Pembangunan Pemprovsu melalui Media Tradisional pertunjukan rakyat kab/ko	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	0 0	2	0%
2	Lomba Pagelaran Media Tradisional Pertunjukan Rakyat dalam rangka Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (Saik) Tingkat Nasional	Terlaksananya Pagelaran Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	0 -	2	0%
3	Workshop Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Frekuensi Workshop Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	0 -	2	0%
4	Forum Dialog isu publik	Terinformasinya program-program Pemerintah melalui forum dialog	6 kali	1 kali	1 kali	0 -	0%	- -	-	0%
5	Dialog Interaktif melalui televisi siaran	Frekuensi kegiatan pemerintah Sumatera Utara melalui Televisi Siaran	96 kali	12 kali	18 kali	18 kali	100%	2 kali	32	33%
6	Dialog Interaktif melalui radio siaran	Frekuensi kegiatan pemerintah Sumatera Utara melalui Radio Siaran	106 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%	6 kali	30	28%
7	Sarasehan Hari Besar bersejarah dan kenegaraan	Frekuensi dan jumlah peserta sarasehan hari bersejarah dan kenegaraan	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	0 -	2	40%
8	Aspirasi Publik melalui radio siaran	Frekuensi Aspirasi Publik	50 kali	10 kali	10 kali	10 bulan	100%	0 -	20	40%

9	Berita Sumatera Utara melalui televisi siaran	Frekuensi Berita Sumut	234 paket 0	541 paket	440 paket	342 paket	78%	36 paket	919	39%
10	Mimbar Agama melalui televisi siaran	Frekuensi Mimbar Agama Islam, Kristen Katholik/Protestan, Budha/Hindu dan Khonghucu di TVRI	180 kali	36 kali	36 kali	36 kali	100%	0 -	72	40%
11	Iklan Layanan Masyarakat melalui televisi siaran dan radio siaran	Frekuensi Iklan Layanan Masyarakat	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3	60%
12	Pameran di Pekan Raya Sumatera Utara Tahun 2020	Frekuensi Pekan Raya Sumatera Utara	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	0 -	2	40%
13	Diseminasi Informasi Media luar ruang (Media Outdoor/indoor)	Frekuensi Diseminasi Informasi Media luar ruang (Media Outdoor /indoor)	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	0 -	24	40%
14	Pembuatan dan Pencetakan Kalender Pemprovsu	Jumlah kalender Pemprovsu yang dicetak	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	0 -	2	40%
15	Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara	Terpilihnya pemenang Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Sadar Teknologi Informasi	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	0 -	2	40%
16	Lomba Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Sumatera Utara	Frekuensi lomba kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	0 0	2	40%

17	Operasional peliputan Informasi Publik	Tercentralnya informasi publik melalui pusat informasi publik Diskominfo Provsu	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
18	Pemberdayaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat	Frekuensi pemberdayaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat	5 kali	0	0	0	0%	1 kali	1	20%
VII.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	Meningkatnya pelayanan informasi multimedia yang berkualitas							-	
1	Pemakaian Access Internet dan Intranet Lokal Link Dari Provider Ke Pemprov	Terlaksananya pembayaran tarif access internet lokal link	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
2	Pengelolaan dan Pengembangan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemprov	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Pemprov	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
2	Pengelolaan server, peralatan multimedia dan jaringan	Terkelolanya Server, peralatan Multimedia dan jaringan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
3	Pengembangan Sistem keamanan Informasi	Terjaganya kewananaan Informasi	60 bulan	0	0	12 bulan	0%	12 bulan	24	40%
4	Pengelolaan Layanan Aplikasi e-Government	Adanya Pengelolaan Layanan Aplikasi E-Government	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%

6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Melalui Website Melalui Website sumutprov.go.id	Terwujudnya pelayanan informasi melalui website sumutprov.go.id yang berkualitas	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Melalui Website Diskominfo Provsu	Terwujudnya pelayanan informasi melalui website Diskominfo Provsu	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
8	Pengelolaan Sistem Informasi Smart Province	Terintegrasinya Sistem Informasi Smart Province	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
9	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Smart Province	Terwujudnya Layanan Smart Province Yang Berkualitas	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem e-Government	Terintegrasinya Ekosistem e-Government	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
11	Penyusunan Regulasi Tata Kelola e-Government	Terwujudnya regulasi tata kelola e-Government yang berkualitas	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
12	Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Terwujudnya sumber daya bidang TIK yang berkualitas	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	0	24	40%
13	Pembuatan Audiovisual LKPJ Gubsu	Tersedianya audiovisual LKPJ Gubsu	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	0	2	40%

14	Operasional pengelolaan data center dan Peningkatan SDM TIK	Tersedianya Operasional pengelolaan data center dan Peningkatan SDM TIK	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24	40%
15	Optimalisasi Data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Terselenggaranya rapat dan evaluasi teknis pengolahan data TIK	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	0	2	40%
16	Monitoring Persandian dan keamanan informasi	Termonitoringnya Persandian dan keamanan informasi	12 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	0	12	100%
17	Pengumpulan data dan penyelarasan persandian Pusat, Provinsi dan kab/kota	Tersedianya dokumen terkait persandian	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	0	12	100%
18	Pembelajaran dan peningkatan kapabilitas mengenai sandi Telekomunikasi dan sistem keamanan informasi	bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur tentang persandian dan telekomunikasi	12 bulan	0	12 bulan	12 bulan	0%	0	12	100%
19	Peningkatan kapasitas Persandian dan keamanan Informasi	bertambahnya wawasan aparatur tentang keamanan informasi	12 bulan		12 bulan	12 bulan	0%	0	12	100%
VII.	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga	Meningkatnya Pelayanan Informasi Kemitraan								-
1	Penyusunan Data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara	Tersusunnya data statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24	40%

2	Pertemuan Tematik Bakohumas	Terlaksananya tematik bakohumas	6 kali		4 kali	4 kali	100%	0	4	67%
3	Lomba Karya Tulis /Lomba Foto bagi Jurnalis dalam rangka Hari Jadi Pemprov	Terpilihnya pemenang lomba karya tulis /lomba foto dalam rangka hari Jadi Pemprov	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	0	2	40%
4	Pembekalan Tata Kepemimpinan Jurnalis dalam rangka mendukung Good Government	Bertambahnya wawasan jurnalis dalam mendukung Good Government	6 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	0	2	33%
5	Pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional, Tingkat Wilayah Pusat dan Nasional	Terjalannya hubungan/koordinasi yang selaras, serasi antar anggota Bakohumas baik tingkat nasional dan pusat	20 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	0	4	20%
6	Temu Konsultasi Bakohumas	Frekuensi Temu Konsultasi Bakohumas	22 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	0	8	36%
7	Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu	tersedianyanya operasional PPID Provsu	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
8	Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu	jumlah peserta yang mengikuti bimtek PPID	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	0	2	40%
9	Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu	jumlah peserta yang mengikuti Rakor PPID	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	0	2	40%

10	Operasional Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara	Tersedianya Operasional Komisi Informasi provinsi Sumatera Utara	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
11	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Frekuensi penyelesaian sengketa Informasi publik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	0	24	40%
12	Operasional Komisi Informasi Provsu Sumatera Utara	Terlaksananya Operasional Komisi Informasi Provsu Sumatera Utara	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	60%
13	Kerjasama Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah tentang Komisi Informasi	Terlaksananya Kerjasama Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah tentang Komisi Informasi	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	-	2	40%
14	Selayang Pandang Sumatera Utara	Tersedianya video selayang pandang Sumatera Utara	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	0	2	40%
15	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi	Terlaksananya Pemeringkatan Keterbukaan Informasi	5 kali				0%	0	-	0%
16	Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi Provsu	Tersusunnya Laporan tahunan Komisi Informasi Provsu	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	0	2	40%
17	Peningkatan SDM Keterbukaan Informasi	Meningkatnya SDM Keterbukaan Informasi	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0%	0	2	40%
18	Refleksi Akhir Tahun	Terinformasinya capaian kinerja Pemprovsu	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	0	2	40%
19	Coffee Morning dengan Stakeholder	Frekuensi Terlaksananya Coffee Morning dan Konferensi Pers dengan Media	30 kali	8 kali	6 kali	6 kali	100%	0	14	47%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dalam menentukan skala penilaian kinerja, Dinas Kominfo Provsu mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang, Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi rancanganperaturan Daerah tentang rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pencapaian kinerja yang diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, tidak ada hal disebabkan karena adanya reconfusing anggaran untuk dana covid-19 yang mana kegiatan yang dilakukan dalam bentuk covid dtiadakan .

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kominfo Provsu pada tahun 2020 berdasarkan Indikator Kinerja Pada RPJMD adalah sebagai berikut :

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018*	Target Capaian Tahun 2020	REALISASI
I.	Komunikasi dan Informatika			
1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat Sumatera Utara	67 %	86 %	61%
2.	Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	80 %	87 %	74 %
3.	Rasio Sistem Pelayanan Berbasis Online	6 %	41 %	44 %
II.	Statistik			
	Data Statistik Sektoral	-	50 %	71 %
III.	Persandian			
	Persentase Perangkat Daerah yang memahami persandian dan keamanan informasi	-	25 %	10 %

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya penyebaran Informasi publik		Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	85	87	87	90	90	89	74	87	90	realisasi capaian di tahun 2020 untuk IKK cakupan pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik mengalami penurunan karena ada beberapa kegiatan yang mengalami refocussing untuk dana covid-19
2	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan Sumatera Utara		Data Statistik Sektoral	25	50	89	92	92	29	71	89	92	
3	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Rasio Sistem Pelayanan Berbasis Online	20	41	55	65	75	20	44	55	65	
4	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan keamanan Informasi daerah		Persentase Perangkat Daerah yang memahami Persandian dan Keamanan Informasi	10	10	20	30	50	10	10	20	30	

3 Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Pada bahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa secara umum kinerja pelayanan SKPD Dinas Kominfo Provsu sudah menunjukkan hasil yang optimal, baik dari pencapaian sasaran kinerja RPJMD, maupun IKU OPD. Namun demikian, masih terdapat isu – isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Provsu terkait kinerja pelayanan OPD yaitu :

1. Belum terintegrasi Smart Province ke kabupaten/kota
2. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di kab/ko belum menyeluruh , dimana saat ini jumlah KIM yang terbentuk sebanyak 181 KIM yang tersebar di 22 kab/ko.
3. Belum semua Kabupaten/Kota memiliki Group Media Pertunjukan Rakyat
4. Kelompok Informasi Masyarakat yang belum berbasis IT
5. Masih rendahnya kompetensi aparatur dibidang Persandian dan statistik
6. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Sumatera Utara yang disebabkan oleh ketimpangan dan perbedaan akibat ketidakseimbangan pertumbuhan TIK yang dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung;

Tingkat pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten/kota dalam hal koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang berpedoman kepada Permendagri nomor 90 Tahun 2019.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Dinas Kominfo Provsu

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Kominfo Provsu dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya adalah:

1. Belum optimalnya pelaksanaan bidang persandian dan statistik sektoral
2. Perlunya peningkatan pemberdayaan dan Workshop Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten / Kota.
3. Perlunya peningkatan sosialisasi dan pembinaan media Pertunjukan Rakyat sebagai media penyampai informasi pemerintah daerah di Kabupaten/Kota.

2.3.3. Dampak Isu-isu strategis terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Capaian Program Nasional

Dampak yang ditimbulkan dari adanya isu-isu strategis bidang kominfo, yaitu kurang maksimalnya pelayanan pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik, baik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih hal ini sesuai dengan Misi ke 2 (dua) yaitu Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya Pemerintah yang bersih dan dicintai, tata kelola Pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis. hal ini dapat dilaksanakan melalui implementasi e-goverment dan pemanfaatan TIK .

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Kominfo Provsu dalam meningkatkan pelayanan adalah :

1. Pengintegrasian data Smart Province ke kab/ko
2. Kelompok Informasi Masyarakat dan Group Pertunjukan Rakyat di Kab/ko harus berbasis IT
3. Masih rendahnya kompetensi aparatur dibidang Persandian dan statistik

Sedangkan peluang yang bisa diambil Dinas Kominfo Provsu dari tantangan tersebut adalah :

1. Perlu adanya inovasi-inovasi baru dalam pengintegrasian data Smart Province ke kab/ko
2. Adanya pemahaman tentang perkembangan Teknologi bagi Kelompok informasi masyarakat dan group media Pertunjukan Rakyat;
3. Adanya pelatihan dan Bimtek dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber daya aparatur dalam bidang statistik dan persandian

2.3.5. Formulasi isu-isu penting / rekomendasi

Dari penjabaran isu – isu penting di atas, dapat direkomendasikan hal –hal sebagai berikut sebagai alternatif /upaya pemecahan masalah, yaitu :

1. Perlu adanya inovasi-inovasi baru dalam pengintegrasian data Smart Province ke kab/ko
2. Perlunya meningkatkan kuantitas kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan media pertunjukan rakyat;

3. Perlunya membuat sistem aplikasi yang dapat mengintegrasikan ke Kabupaten / Kota ataupun Kecamatan dan Desa;
4. Perlunya peningkatan kuantitas pelaksanaan Bimtek PPID di Kabupaten/kota.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada. Dokumen perencanaan daerah terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen perencanaan tersebut merupakan dasar dalam melaksanakan program / kegiatan pembangunan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Telaah terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2021, dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian Renstra Dinas Kominfo dengan hasil pencapaian target tahunan. Untuk rancangan awal RKPD anggaran dinas Kominfo Provsu sebesar Rp. 57.980.051.030,-. Anggaran tersebut sudah meliputi kegiatan Biro Humas. Hal ini sebagai tindak lanjut pada Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengalihan Tugas kehumasan dari Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Sumatera Utara.

Tabel T.C 31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika										
	Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu										
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Medan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	12 bulan	25.400.078.767	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Medan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	12 bulan	29.010.598.323	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Medan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan	1 dokumen	61.400.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Medan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan	1 dokumen	68.400.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Medan	Jumlah Dokumen Renja yang disusun	1 dokumen	35.170.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Medan	Jumlah Dokumen Renja yang disusun	1 dokumen	42.170.000,00	

			Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah Lintas OPD	1 kali				Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah Lintas OPD	1 kali		
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Medan	Jumlah dokumen RKA dan DPA Diskominfo yang dihasilkan	2 dokumen	16.380.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Medan	Jumlah dokumen RKA dan DPA Diskominfo yang dihasilkan	2 dokumen	16.380.000,00	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Medan	Jumlah Dokumen Laporan LKPJ dan LPPD Diskominfo yang tersusun	1 dokumen	9.850.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Medan	Jumlah Dokumen Laporan LKPJ dan LPPD Diskominfo yang tersusun	1 dokumen	9.850.000,00	
			Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Evaluasi Yang Disusun	5 dokumen				Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Evaluasi Yang Disusun	5 dokumen		
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Medan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Yang Dihasilkan		16.335.998.406,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Medan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Yang Dihasilkan		16.335.998.406,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Medan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Kominfo Provsu	12 bulan	16.283.326.006,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Medan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Kominfo Provsu	12 bulan	16.283.326.006,00	

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Medan	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Akhir Tahun Yang Dihasilkan	1 dokumen	40.599.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Medan	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Akhir Tahun Yang Dihasilkan	1 dokumen	40.599.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Medan	Jumlah Dokumen Laporan Fisik Keuangan Dinas Kominfo	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Medan	Jumlah Dokumen Laporan Fisik Keuangan Dinas Kominfo	1 dokumen		
			Jumlah Dokumen Laporan Persemester OPD Dinas Kominfo Yang Dihasilkan	2 dokumen	12.073.400,00			Jumlah Dokumen Laporan Persemester OPD Dinas Kominfo Yang Dihasilkan	2 dokumen	12.073.400,00	
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Medan	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		290.019.950	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Medan	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		290.019.950	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Medan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	12 bulan	290.019.950	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal		290.019.950	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Medan	Tersedianya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah		1.767.226.678	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Medan	Tersedianya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah		1.744.199.489	

3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Medan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12 bulan	26.130.020	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Medan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12 bulan	26.130.020,00	
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medan	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	12 bulan	145.171.469,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medan	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	12 bulan	145.171.469,00	
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Medan	Jumlah Makan, Minum Bagi Pegawai, Peserta Rapat dan Tamu Diskominfo	12 bulan	107.420.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Medan	Jumlah Makan, Minum Bagi Pegawai, Peserta Rapat dan Tamu Diskominfo	12 bulan	106.820.000,00	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Medan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 bulan	82.678.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Medan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 bulan	60.363.000,00	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Medan	Jumlah Surat Kabar, Perpu dan Buku Perpustakaan Yang Disediakan	12 bulan	75.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Medan	Jumlah Surat Kabar, Perpu dan Buku Perpustakaan Yang Disediakan	12 bulan	75.000.000,00	
8	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Medan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Dihadiri	12 bulan	1.330.827.189,00	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Dihadiri	12 bulan	1.330.715.000,00	

D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Medan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	4.854.231.164	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	8.510.891.566	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Medan	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	4.854.231.164	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	8.510.891.566,00	
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Medan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.610.434.955,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.582.371.298,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Medan	Surat-Surat Dinas, Dokumen Dinas dan Surat Berharga Lainnya	12 bulan	14.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Surat-Surat Dinas, Dokumen Dinas dan Surat Berharga Lainnya	12 bulan	14.000.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Medan	Rekening Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	287.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rekening Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	287.000.000,00	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Medan	Jasa Supervisi Penyusunan Administrasi Keuangan dan Aset Diskominfo	12 bulan	1.309.434.955,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Supervisi Penyusunan Administrasi Keuangan dan Aset Diskominfo	12 bulan	1.281.371.298,00	

			Jumlah Pegawai Kebersihan Gedung dan Lingkungan Kantor Diskominfo Provsu	12 bulan				Jumlah Pegawai Kebersihan Gedung dan Lingkungan Kantor Diskominfo Provsu	12 bulan		
			Jumlah PNS Yang Mendapat Pembinaan	12 bulan				Jumlah PNS Yang Mendapat Pembinaan	12 bulan		
			Petugas Jasa Pengamanan Dinas Kominfo Provsu	6 orang				Petugas Jasa Pengamanan Dinas Kominfo Provsu	6 orang		
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Medan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		480.767.614,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		478.717.614,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Medan	Jumlah Perawatan Kendaraan Operasional Yang Dirawat Rutin/Berkala	12 bulan	231.800.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Medan	Jumlah Perawatan Kendaraan Operasional Yang Dirawat Rutin/Berkala	12 bulan	242.300.000,00	

2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Medan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	32.992.614,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Medan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	32.992.614,00	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Medan	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Yang Rutin/Berkala	12 bulan	215.975.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Medan	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Yang Rutin/Berkala	12 bulan	203.425.000,00	
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Provinsi Sumatera Utara	Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik		17.194.331.338	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik		20.104.560.172	
A	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Tersebaranya Informasi dan Kebijakan Tentang Program Prioritas Pemerintah		17.194.331.338	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Tersebaranya Informasi dan Kebijakan Tentang Program Prioritas Pemerintah		20.104.560.172	
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Provinsi Sumatera Utara	Monitoring dan Rekomendasi Terhadap Opini dan Aspirasi Publik	240 kali	2.630.040.000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Provinsi Sumatera Utara	Monitoring dan Rekomendasi Terhadap Opini dan Aspirasi Publik	240 kali		
			Tersedianya Belanja Hibah Uang kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provsu	12 bulan				Tersedianya Belanja Hibah Uang kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provsu	12 bulan	4.664.917.000,00	

2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Provinsi Sumatera Utara	Penerbitan Konten Pada Media Komunikasi Publik	148 kali	6.651.007.712,00	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Provinsi Sumatera Utara	Penerbitan Konten Pada Media Komunikasi Publik	148 kali	6.651.000.698,00	
			Terpublikasinya Informasi Pemprovsu Kepada Publik	374 kali					Terpublikasinya Informasi Pemprovsu Kepada Publik		374 kali
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Provinsi Sumatera Utara	Diseminasi Pesan Melalui Beragam Media	7 media	2.585.284.800	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Provinsi Sumatera Utara	Diseminasi Pesan Melalui Beragam Media	7 media	3.396.085.000,00	
4	Pelayanan Informasi Publik	Provinsi Sumatera Utara	Tersedianya Operasional Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu	13 kali	607.529.428,00	Pelayanan Informasi Publik	Provinsi Sumatera Utara	Tersedianya Operasional Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu	13 kali	607.522.424,00	
			Terinformasinya Pembangunan Sumatera Utara melalui Media Pameran	1 kali					Terinformasinya Pembangunan Sumatera Utara melalui Media Pameran		1 kali
5	Layanan Hubungan Media	Provinsi Sumatera Utara	Pemuatan Siaran Pers Di Media Massa	12 kali	503.674.750,00	Layanan Hubungan Media	Provinsi Sumatera Utara	Pemuatan Siaran Pers Di Media Massa	12 kali	569.557.000,00	
6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Provinsi Sumatera Utara	Terbentuk Jejaring Dalam Diseminasi Informasi Publik	12 kali	1.734.384.928,00	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Provinsi Sumatera Utara	Terbentuk Jejaring Dalam Diseminasi Informasi Publik	12 kali	1.733.077.424,00	

7	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Provinsi Sumatera Utara	Tersedianya Operasional Keterbukaan Informasi Publik Bagi Komisi Informasi Provsu dan Badan Publik di Sumatera Utara	12 bulan	2.482.409.720	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Provinsi Sumatera Utara	Tersedianya Operasional Keterbukaan Informasi Publik Bagi Komisi Informasi Provsu dan Badan Publik di Sumatera Utara	12 bulan	2.482.400.626,00	
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi		11.134.400.000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi		6.809.484.727	
A	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Medan	Pengelolaan Jumlah Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemprov	49 sub domain	5.400.000.000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Pengelolaan Jumlah Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemprov	49 sub domain	4.140.000.000	
1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Medan	Jumlah Pembayaran Tarif Access Internet Lokal Link	12 bulan	5.400.000.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Pembayaran Tarif Access Internet Lokal Link	12 bulan	4.140.000.000,00	
B	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Utara	Terkelolanya e-Government di Provinsi Sumatera Utara	12 bulan	5.734.400.000	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Terkelolanya e-Government di Provinsi Sumatera Utara	12 bulan	2.669.484.727	

1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Utara	Terselenggaranya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government Provinsi Sumatera Utara	2 regulasi	395.000.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		Terselenggaranya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government Provinsi Sumatera Utara	2 regulasi	395.000.000,00	
			Terkelolanya Website OPD Provsu	49 website				Terkelolanya Website OPD Provsu	49 website		
2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Medan	Pengelolaan Layanan Data Center dan Disaster Recovery Center Pemerintah Provinsi Sumatera Utara		3.300.000.000,00	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Medan	Pengelolaan Layanan Data Center dan Disaster Recovery Center Pemerintah Provinsi Sumatera Utara		290.638.727,00	
3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Medan	Tersedianya Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan yang Berbasis Elektronik serta adanya pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pemerintahan	3 sistem informasi beserta dokumentasi pengembangan	848.500.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Medan	Tersedianya Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan yang Berbasis Elektronik serta adanya pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pemerintahan	3 sistem informasi beserta dokumentasi pengembangan	792.950.000,00	

4	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Medan	Memfasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antara perangkat daerah dengan pemangku kepentingan non-pemerintah terkait penyelenggaraan provinsi dan kota cerdas	5 OPD	310.900.000,00	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Medan	Memfasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antara perangkat daerah dengan pemangku kepentingan non-pemerintah terkait penyelenggaraan provinsi dan kota cerdas	5 OPD	310.900.000,00	
5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Medan	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK Pemprov	12 bulan	880.000.000,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Medan	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK Pemprov	12 bulan	879.996.000,00	
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Provinsi Sumatera Utara	Terwujudnya data statistik sektoral	12 bulan	1.488.676.608,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Terwujudnya data statistik sektoral	12 bulan	1.488.676.608,00	
A	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemprov	12 bulan	1.488.676.608,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemprov	12 bulan	1.488.676.608,00	

1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Provinsi Sumatera Utara	Terkumpulnya Data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara	12 bulan	1.488.676.608,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Terkumpulnya Data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara	12 bulan	1.488.676.608,00	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Provinsi Sumatera Utara	Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi	5 OPD	650.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi	5 OPD	566.731.200,00	

A	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5 OPD	650.000.000,00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5 OPD	566.731.200,00	
---	--	-------------------------	--	-------	----------------	--	--	--	-------	----------------	--

1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		Terselenggaranya Kegiatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Daerah	1 kali	100.000.000,00	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		Terselenggaranya Kegiatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Daerah	1 kali	138.395.200,00	
2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi	Meningkatnya Kualitas SDM Keamanan Informasi	2 kali	200.000.000,00	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		Meningkatnya Kualitas SDM Keamanan Informasi	2 kali	160.736.000,00	
3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Provinsi Sumatera Utara	Terselenggaranya Keamanan Informasi Baik Secara Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik	1 kali	350.000.000,00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Terselenggaranya Keamanan Informasi Baik Secara Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik	1 kali	267.600.000,00	
				JUMLAH	55.867.486.713					57.980.051.030	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Untuk anggaran TA. 2022, usulan program dan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dapat dilaksanakan dalam bentuk Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat. Kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dalam rangka penyampaian informasi kepada masyarakat melalui kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional Pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika diarahkan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut maka sesuai dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung focus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
- b. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
- c. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
- d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pada Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah telah dituangkan dalam UU Nomor 11 tahun 2008, yaitu tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu untuk menindaklanjuti UU Nomor 11 tahun 2008 tersebut Pemerintah Sumatera Utara berkewajiban untuk mengamankan informasi yang dikelola agar nantinya validasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat terjaga.

Dalam penyebaran informasi mempunyai tantangan tersendiri. Belum semua desa terjangkau sarana informasi yang memadai. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara dalam membangun akses komunikasi dan informasi ke desa desa dilakukan dengan memberdayakan Lembaga Komunikasi Sosial yang diantaranya melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan group seni Pertunjukan Rakyat (Pertunra). Keberadaan KIM dan kelompok seni Pertunra adalah sebagai simpul komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang berperan sebagai penyebar (*disseminator*) informasi kepada masyarakat. Dikarenakan melalui kedua media ini, masyarakat akan lebih mudah menerima dan menyerap informasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan pembangunan urusan komunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, hal ini sesuai dengan visi Gubernur Sumatera Utara tahun 2019 - 2023 yaitu Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

Perwujudan dari penguatan kebijakan ketatalaksanaan untuk mendorong proses birokrasi yang sederhana, cepat dan terintegrasi serta membuka ruang partisipasi publik adalah dengan mendorong implementasi teknologi untuk melahirkan kreatifitas dan inovasi dalam membantu proses penyelesaian masalah prioritas dan sektor unggulan daerah, berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif antar wilayah untuk mengakselerasi terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, sehat, nyaman dan aman.

Adapun Sasarannya meningkatkan pelayanan Informasi Publik melalui deseminasi informasi serta Peningkatan Infrastruktutr TIK .

3.3. Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dala rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari

suatu program. Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Untuk Program dan Kegiatan Tahun 2022 telah menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yaitu

1. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Kegiatan :

b) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Evaluasi Kinerja perangkat Daerah

c) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik
Kegiatan :
- a) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
Sub Kegiatan :
- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Layanan Hubungan Media
 - Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
 - Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Kegiatan :
- a) Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi
Sub Kegiatan :
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- b) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

4. Program Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan :

a) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan :

a) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Ada 5 (lima) program Dinas Kominfo provinsi Sumatera Utara yang merupakan penjabaran dari Permen Kominfo RI nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika yang kemudian dituangkan pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk program Prioritas dan kegiatan Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Sumatera Utara tahun 2022 terdapat pada Misi II:

Mewujudkan Masyarakat Sumatera Uatra yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang bersih, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi social yang kuat dan harmonis. Untuk Prioritas Pembangunan Daerah : Reformasi Birokrasi tata kelola Pemerintahan dan peningkatan pelayanan Publik.

Program prioritas :

A. Program

I. Pengelolaan Aplikasi dan Informatika

Kegiatan :

- a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat dan Subdomain dilingkup pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

1. Pemakaian Internet access dan lokal link dari Provider ke pemrovsu
2. Operasiomal dan layanan Infrastruktur Dasar Data Center dan Disaster Recorvery Center dan TIK.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia TIK Sumatera Utara
4. Operasional dan Pengembangan Infrastruktur TIK

- b. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah berbasis Elektronik
2. Pengembangan dan pengelolaan Ekosistem provinsi Cerdas dan Kota Cerdas.
3. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO).
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengembangan Ekosistem SPBE
5. Pengembangan dan pengelolaan Sumber daya Manusia dalam Pengembangan Ekosistem SPBE.
6. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
7. Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam pengembangan aplikasi

8. Monitoring, evaluasi dan pelayanan pengembangan aplikasi
9. Penyelenggaraan sistem penghubung layanan Pemerintah
10. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya Manusia dalam pengelolaan aplikasi
11. Penatalaksanaan dan penyusunan Regulasi e- Government
12. Pembinaan Tehnis Portal dan Situs Web
13. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengelolaan aplikasi
14. pengelolaan aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik

II. Program penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan :

Penyelenggaraan statistik Sektoral dilingkup daerah Provinsi

Sub kegiatan :

1. Pengumpulan data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara
2. Adanya Pengolahan Data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara
3. Layanan Data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara

III. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Kegiatan :

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
2. Pelaksanaan keamanan Informasi Berbasis Elektronik

IV. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan :

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media
3. Pelayanan Informasi Publik
4. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 mempunyai 9 program dan 67 kegiatan. Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada 4 program sedangkan 5 program sebagai pendukung yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Disiplin Aparatur, program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Sedangkan program yang mendukung capaian sasaran ada 4 yaitu Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Program Pengelolaan aplikasi Informatika.

Usulan pendanaan untuk Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Provsu TA. 2022 adalah sebesar Rp. 57.980.051.030,- Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif serta prakiraan maju Tahun 2023 dilihat ada tabel 3.2 dalam lampiran berikut ini :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika							
	Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu			57.980.051.030,00	APBD			57.980.051.030,00
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi		29.010.598.323,00			95%	29.010.598.323,00
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan		68.400.000,00				68.400.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang disusun	Kota Medan	1 dokumen	42.170.000,00	APBD	1 dokumen	42.170.000,00
		Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah Lintas OPD		1 kali		APBD	1 kali	
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA Diskominfo yang dihasilkan	Kota Medan	2 dokumen	16.380.000,00	APBD	2 dokumen	16.380.000,00

	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan LKPJ dan LPPD Diskominfo yang tersusun	Kota Medan	2 dokumen	9.850.000,00	APBD		2 dokumen	9.850.000,00
			Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Evaluasi Yang Disusun		5 dokumen		5 dokumen			
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Yang Dihasilkan			16.335.998.406,00				16.335.998.406,00
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Kominfo Provsu	Kota Medan	12 bulan	16.283.326.006,00	APBD		12 bulan	16.283.326.006,00
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Akhir Tahun Yang Dihasilkan	Kota Medan	1 dokumen	40.599.000,00	APBD		1 dokumen	40.599.000,00
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Fisik Keuangan Dinas Kominfo	Kota Medan	12 laporan	12.073.400,00	APBD		12 dokumen	12.073.400,00
			Jumlah Dokumen Laporan Persemester OPD Dinas Kominfo Yang Dihasilkan		2 dokumen		2 dokumen			
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			290.019.950,00				290.019.950,00
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Medan	12 bulan	290.019.950,00	APBD		12 bulan	290.019.950,00
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah			1.744.199.489,00				1.744.199.489,00

	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Kota Medan	12 bulan	26.130.020,00	APBD		12 bulan	26.130.020,00
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	Kota Medan	12 bulan	145.171.469,00	APBD		12 bulan	145.171.469,00
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan, Minum Bagi Pegawai, Peserta Rapat dan Tamu Diskominfo	Kota Medan	12 bulan	106.820.000,00	APBD		12 bulan	106.820.000,00
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Kota Medan	12 bulan	60.363.000,00	APBD		12 bulan	60.363.000,00
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar, Perpu dan Buku Perpustakaan Yang Disediakan	Kota Medan	12 bulan	75.000.000,00	APBD		12 bulan	75.000.000,00
	6	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Dihadiri		12 bulan	1.330.715.000,00	APBD		12 bulan	1.330.715.000,00
5.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.510.891.566,00				8.510.891.566,00
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Medan	12 bulan	8.510.891.566,00	APBD		12 bulan	8.510.891.566,00
6.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.582.371.298,00				1.582.371.298,00
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat-Surat Dinas, Dokumen Dinas dan Surat Berharga Lainnya	Kota Medan	12 bulan	14.000.000,00	APBD		12 bulan	14.000.000,00
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Listrik, Air dan Telepon	Kota Medan	12 bulan	287.000.000,00	APBD		12 bulan	287.000.000,00

	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Supervisi Penyusunan Administrasi Keuangan dan Aset Diskominfo	Kota Medan	12 bulan	1.281.371.298,00	APBD		12 bulan	1.281.371.298,00
			Jumlah Pegawai Kebersihan Gedung dan Lingkungan Kantor Diskominfo Provsu	Kota Medan	12 bulan		APBD		12 bulan	
			Jumlah PNS Yang Mendapat Pembinaan	Kota Medan	12 bulan		APBD		12 bulan	
			Petugas Jasa Pengamanan Dinas Kominfo Provsu	Kota Medan	12 bulan		APBD		12 bulan	
7.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			478.717.614,00				478.717.614,00
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perawatan Kendaraan Operasional Yang Dirawat Rutin/Berkala	Kota Medan	12 bulan	242.300.000,00	APBD		12 bulan	242.300.000,00
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Medan	12 bulan	32.992.614,00	APBD		12 bulan	32.992.614,00
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Yang Rutin/Berkala	Kota Medan	12 bulan	203.425.000,00	APBD		12 bulan	203.425.000,00
II.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik		90%	20.104.560.172,00			92%	20.104.560.172,00
1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Tersebar nya Informasi dan Kebijakan Tentang Program Prioritas Pemerintah			20.104.560.172,00				20.104.560.172,00

	1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Pemantauan dan Rekomendasi Terhadap Opini dan Aspirasi Publik		240 kali		APBD		240 kali	
			Tersedianya Belanja Hibah Uang kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provsu		12 bulan	4.664.917.000,00	APBD		12 bulan	4.664.917.000,00
	2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Penerbitan Konten Pada Media Komunikasi Publik		148 kali		APBD		148 kali	
			Terpublikasinya Informasi Pemprovsu Kepada Publik		374 kali	6.651.000.698,00	APBD		374 kali	6.651.000.698,00
	3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diseminasi Pesan Melalui Beragam Media		7 media	3.396.085.000,00	APBD		7 media	3.396.085.000,00
	4	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Operasional Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu		13 kali		APBD		13 kali	
			Terinformasinya Pembangunan Sumatera Utara melalui Media Pameran		1 kali	607.522.424,00			1 kali	607.522.424,00
	5	Layanan Hubungan Media	Pemuatan Siaran Pers Di Media Massa		12 kali	569.557.000,00	APBD		12 kali	569.557.000,00
	6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terbentuk Jejaring Dalam Diseminasi Informasi Publik		12 kali	1.733.077.424,00	APBD		15 kali	1.733.077.424,00
	7	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Tersedianya Operasional Keterbukaan Informasi Publik Bagi Komisi Informasi Provsu dan Badan Publik di Sumatera Utara		12 bulan	2.482.400.626,00	APBD		12 bulan	2.482.400.626,00

III.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Medan	92%	6.809.484.727,00		92%	6.809.484.727,00
1.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Pengelolaan Jumlah Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemprovsu			4.140.000.000,00			4.140.000.000,00
	1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Pembayaran Tarif Access Internet Lokal Link		12 bulan	4.140.000.000,00	APBD	12 bulan	4.140.000.000,00
2.	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Terkelolanya e-Government di Provinsi Sumatera Utara			2.669.484.727,00			2.669.484.727,00
	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government Provinsi Sumatera Utara		2 regulasi	395.000.000,00	APBD	2 regulasi	395.000.000,00
			Terkelolanya Website OPD Provsu		49 website OPD		APBD	49 website OPD	
	2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Layanan Data Center dan Disaster Recovery Center Pemerintah Provinsi Sumatera Utara		12 bulan	290.638.727,00	APBD	12 bulan	290.638.727,00
	3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan yang Berbasis Elektronik serta adanya pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pemerintahan		3 sistem informasi	792.950.000,00	APBD	3 sistem informasi	792.950.000,00

	4	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Memfasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antara perangkat daerah dengan pemangku kepentingan non-pemerintah terkait penyelenggaraan provinsi dan kota cerdas		5 OPD	310.900.000,00	APBD		5 OPD	310.900.000,00
	5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK Pemprov		12 bulan	879.996.000,00	APBD		12 bulan	879.996.000,00
IV.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Terwujudnya data statistik sektoral		95%	1.488.676.608,00			95%	1.488.676.608,00
1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemprov			1.488.676.608,00				1.488.676.608,00
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terkumpulnya Data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara		12 bulan	1.488.676.608,00	APBD		12 bulan	1.488.676.608,00
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi	Medan	90%	566.731.200,00			92%	566.731.200,00

1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			566.731.200,00				566.731.200,00	
	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Kegiatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Daerah	Medan	1 kali	138.395.200,00	APBD		1 kali	138.395.200,00
	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas SDM Keamanan Informasi	Medan	2 kali	160.736.000,00	APBD		2 kali	160.736.000,00
	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terselenggaranya Keamanan Informasi Baik Secara Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik	Medan	1 kali	267.600.000,00	APBD		1 kali	267.600.000,00

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan urusan bidang Komunikasi dan Informatika

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Semoga Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi Sumatera Utara

Nama SKPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 25	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika								
1 25 01	Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu				57,980,051,030.00	APBD			57,980,051,030.00
	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi		92%	29,010,598,323.00			95%	29,010,598,323.00
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan			68,400,000.00				68,400,000.00
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang disusun	Kota Medan	1 dokumen	42,170,000.00	APBD	1 dokumen	42,170,000.00	
		Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah Lintas OPD		1 kali		APBD	1 kali		
	2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA Diskominfo yang dihasilkan	Kota Medan	2 dokumen	16,380,000.00	APBD	2 dokumen	16,380,000.00	
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan LKPJ dan LPPD Diskominfo yang tersusun	Kota Medan	2 dokumen	9,850,000.00	APBD	2 dokumen	9,850,000.00	
		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Evaluasi Yang Disusun		5 dokumen		APBD	5 dokumen		
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Yang Dihasilkan			16,335,998,406.00			16,335,998,406.00	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Kominfo Provsu	Kota Medan	12 bulan	16,283,326,006.00	APBD	12 bulan	16,283,326,006.00	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Akhir Tahun Yang Dihasilkan	Kota Medan	1 dokumen	40,599,000.00	APBD	1 dokumen	40,599,000.00	
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Fisik Keuangan Dinas Kominfo	Kota Medan	12 laporan	12,073,400.00	APBD	12 dokumen	12,073,400.00	
		Jumlah Dokumen Laporan Persemester OPD Dinas Kominfo Yang Dihasilkan		2 dokumen		APBD	2 dokumen		
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			290,019,950.00			290,019,950.00	
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Medan	12 bulan	290,019,950.00	APBD	12 bulan	290,019,950.00	
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah			1,744,199,489.00			1,744,199,489.00	
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Kota Medan	12 bulan	26,130,020.00	APBD	12 bulan	26,130,020.00	
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	Kota Medan	12 bulan	145,171,469.00	APBD	12 bulan	145,171,469.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan, Minum Bagi Pegawai, Peserta Rapat dan Tamu Diskominfo	Kota Medan	12 bulan	106,820,000.00	APBD		12 bulan	106,820,000.00
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Kota Medan	12 bulan	60,363,000.00	APBD		12 bulan	60,363,000.00
	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar, Perpu dan Buku Perpustakaan Yang Disediakan	Kota Medan	12 bulan	75,000,000.00	APBD		12 bulan	75,000,000.00
	6 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Dihadiri		12 bulan	1,330,715,000.00	APBD		12 bulan	1,330,715,000.00
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8,510,891,566.00				8,510,891,566.00
	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Medan	12 bulan	8,510,891,566.00	APBD		12 bulan	8,510,891,566.00
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,582,371,298.00				1,582,371,298.00
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat-Surat Dinas, Dokumen Dinas dan Surat Berharga Lainnya	Kota Medan	12 bulan	14,000,000.00	APBD		12 bulan	14,000,000.00
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Listrik, Air dan Telepon	Kota Medan	12 bulan	287,000,000.00	APBD		12 bulan	287,000,000.00
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Supervisi Penyusunan Administrasi Keuangan dan Aset Diskominfo	Kota Medan	12 bulan	1,281,371,298.00	APBD		12 bulan	1,281,371,298.00
		Jumlah Pegawai Kebersihan Gedung dan Lingkungan Kantor Diskominfo Provsu	Kota Medan	12 bulan		APBD		12 bulan	
		Jumlah PNS Yang Mendapat Pembinaan	Kota Medan	12 bulan		APBD		12 bulan	
		Petugas Jasa Pengamanan Dinas Kominfo Provsu	Kota Medan	12 bulan		APBD		12 bulan	
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			478,717,614.00				478,717,614.00
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perawatan Kendaraan Operasional Yang Dirawat Rutin/Berkala	Kota Medan	12 bulan	242,300,000.00	APBD		12 bulan	242,300,000.00
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Medan	12 bulan	32,992,614.00	APBD		12 bulan	32,992,614.00
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Yang Rutin/Berkala	Kota Medan	12 bulan	203,425,000.00	APBD		12 bulan	203,425,000.00
	ii. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik		90%	20,104,560,172.00			92%	20,104,560,172.00
	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Tersebaranya Informasi dan Kebijakan Tentang Program Prioritas Pemerintah			20,104,560,172.00				20,104,560,172.00
	1 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Pemantauan dan Rekomendasi Terhadap Opini dan Aspirasi Publik		240 kali	4,664,917,000.00	APBD		240 kali	4,664,917,000.00
		Tersedianya Belanja Hibah Uang kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provsu		12 bulan		APBD		12 bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Penerbitan Konten Pada Media Komunikasi Publik	148 kali	6,651,000,698.00	APBD		148 kali	6,651,000,698.00
			Terpublikasinya Informasi Pemprov Kepada Publik	374 kali		APBD		374 kali	
	3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diseminasi Pesan Melalui Beragam Media	7 media	3,396,085,000.00	APBD		7 media	3,396,085,000.00
	4	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Operasional Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu	13 kali	607,522,424.00	APBD		13 kali	607,522,424.00
			Terinformasinya Pembangunan Sumatera Utara melalui Media Pameran	1 kali				1 kali	
	5	Layanan Hubungan Media	Pemuatan Siaran Pers Di Media Massa	12 kali	569,557,000.00	APBD		12 kali	569,557,000.00
	6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terbentuk Jejaring Dalam Diseminasi Informasi Publik	12 kali	1,733,077,424.00	APBD		15 kali	1,733,077,424.00
	7	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Tersedianya Operasional Keterbukaan Informasi Publik Bagi Komisi Informasi Provsu dan Badan Publik di Sumatera Utara	12 bulan	2,482,400,626.00	APBD		12 bulan	2,482,400,626.00
	III.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dankomunikasi	Medan	92%	6,809,484,727.00		92%	6,809,484,727.00
	1.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Jumlah Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemprov			4,140,000,000.00			4,140,000,000.00
	1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Pembayaran Tarif Access Internet Lokal Link	12 bulan	4,140,000,000.00	APBD		12 bulan	4,140,000,000.00
	2.	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terkelolanya e-Government di Provinsi Sumatera Utara			2,669,484,727.00			2,669,484,727.00
	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government Provinsi Sumatera Utara	2 regulasi	395,000,000.00	APBD		2 regulasi	395,000,000.00
			Terkelolanya Website OPD Provsu	49 website OPD		APBD		49 website OPD	
	2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Layanan Data Center dan Disaster Recovery Center Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	12 bulan	290,638,727.00	APBD		12 bulan	290,638,727.00
	3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan yang Berbasis Elektronik serta adanya pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pemerintahan	3 sistem informasi	792,950,000.00	APBD		3 sistem informasi	792,950,000.00
	4	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Memfasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antara perangkat daerah dengan pemangku kepentingan non-pemerintah terkait penyelenggaraan provinsi dan kota cerdas	5 OPD	310,900,000.00	APBD		5 OPD	310,900,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	5 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK Pemprov		12 bulan	879,996,000.00	APBD		12 bulan	879,996,000.00
	IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya data statistik sektoral		95%	1,488,676,608.00			95%	1,488,676,608.00
	1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemprov			1,488,676,608.00				1,488,676,608.00
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terkumpulnya Data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara		12 bulan	1,488,676,608.00	APBD		12 bulan	1,488,676,608.00
	V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi	Medan	90%	566,731,200.00			92%	566,731,200.00
	1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			566,731,200.00				566,731,200.00
	1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Kegiatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Daerah	Medan	1 kali	138,395,200.00	APBD		1 kali	138,395,200.00
	2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas SDM Keamanan Informasi	Medan	2 kali	160,736,000.00	APBD		2 kali	160,736,000.00
	3 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terselenggaranya Keamanan Informasi Baik Secara Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik	Medan	1 kali	267,600,000.00	APBD		1 kali	267,600,000.00

Medan, 2021

KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ir. H. Irman, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610905 199003 1 004

				VIII.	Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga	Terwujudnya pelayanan informasi kemitraan	Sumut	12 bulan	5,792,830,750	APBD	-	12 bulan	5,698,107,750
				1	Penyusunan Data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara	Tersusunnya data statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara	Sumatera Utara	12 bulan	562,310,907	APBD	-	12 bulan	562,310,907
				2	Pertemuan Tematik Bakohumas	Terlaksananya tematik bakohumas	Medan	4 kali	135,800,000	APBD	-	4 kali	135,800,000
				3	Jumpa Pers Instansi	Terlaksananya jumpa pers instansi	Medan	12 kali	296,600,000	APBD	-	12 kali	296,600,000
				4	Lomba Karya Tulis /Lomba Foto bagi Jurnalis dalam rangka Hari Jadi Pemprov	Terpilihnya pemenang lomba karya tulis /lomba foto dalam rangka hari Jadi Pemprov	Medan	1 kali	144,850,000	APBD	-	1 kali	144,850,000
				5	Pembekalan Tata Kepemimpinan Jurnalis dalam rangka mendukung Good Government	Bertambahnya wawasan jurnalis dalam mendukung Good Government	Medan	1 kali	423,564,000	APBD	-	1 kali	423,564,000
				6	Pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional, Tingkat Wilayah Pusat dan Nasional	Terjalinnnya hubungan/koordinasi yang selaras, serasi antar anggota Bakohumas baik tingkat nasional dan pusat	Medan	4 kali	84,700,000	APBD	-	4 kali	84,700,000
				7	Temu Konsultasi Bakohumas	Frekuensi Temu Konsultasi Bakohumas	Medan	8 kali	752,610,000	APBD	-	8 kali	752,610,000
				8	Pertemuan Infokom/Humas Pemprov	Frekuensi Pertemuan Infokom/Humas Pemprov	Medan	8 kali	333,730,000	APBD	-	8 kali	333,730,000
				9	Iklan Layanan Masyarakat, Advetorial dan Galeri	Frekuensi Iklan Layanan Masyarakat, Advetorial dan Galeri	Medan	12 bulan	933,886,843	APBD	-	12 bulan	933,886,843
				10	Operasional Pusat Informasi Publik dan Media Center	Tersentralnya informasi publik melalui Pusat Informasi Publik Diskominfo Prov	Sumatera Utara	12 bulan	1,235,776,000	APBD	-	12 bulan	1,235,776,000

				11	Operasional pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	Tersedianya Operasional pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	Medan	12 bulan	112,424,000	APBD	-	12 bulan	112,424,000
				12	Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu	tersedianyanya operasional PPID Provsu	Medan	12 bulan	67,124,000	APBD	-	12 bulan	67,124,000
				13	Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu	jumlah peserta yang mengikuti bimtek PPID	Medan	2 kali	119,016,000	APBD	-	2 kali	119,016,000
				14	Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu	jumlah peserta yang mengikuti bimtek PPID	Medan	2 kali	119,016,000	APBD	-	2 kali	119,016,000
				15	Refleksi Akhir Tahun	Terinformasinya capaian kinerja Pemprovsu	Medan	12 bulan	158,400,000	APBD	-	12 bulan	158,400,000
				16	Coffee Morning dengan Stakeholder	Frekuensim coffee morning dengan stakeholder	Medan	8 kali	218,300,000	APBD	-	8 kali	218,300,000
				17	Forum Dialog dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Frekuensi Forum Dialog dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Medan	2 kali	94,723,000	APBD	-	-	-